

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 21, No. 1, Maret 2016

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	i-ii
● PENEKAKAN HUKUM TINDAKAN PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (<i>CONTEMPT OF COURT</i>) <i>oleh: Puteri Hikmawati</i>	1-16
● DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS MAKROEKONOMI: STUDI KASUS DI INDONESIA <i>oleh: Rasbin</i>	17-35
● ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI: STUDI KASUS DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2004 - 2014 <i>oleh: Ari Mulianta Ginting</i>	37-58
● REPOSISI PERAN DAN FUNGSI BULOG DALAM TATA NIAGA PANGAN <i>oleh: Lokot Zein Nasution</i>	59-73
● ANALISIS KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 <i>oleh: Tri Rini Puji Lestari</i>	75-88

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal “Kajian”: edisi bulan Maret 2016 menyajikan 5 (lima) tulisan dengan latar belakang ilmu yang bervariasi. Kelima tulisan ini merupakan hasil seleksi dari 8 (delapan) karya tulis ilmiah yang masuk ke redaksi jurnal “Kajian”. Kelima tulisan itu diawali dengan tulisan Puteri Hikmawati tentang Penegakan Hukum Tindakan Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*). Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang membahas pengaturan tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang ada saat ini, penegakan hukumnya, dan pengaturan tindakan penghinaan terhadap pengadilan dalam RUU KUHP. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penghinaan terhadap pengadilan telah diatur dalam KUHP dan KUHP. Namun, tidak banyak kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dikarenakan rumusan UU yang tidak secara eksplisit menyebutkan tindakan terkait penghinaan terhadap pengadilan. Hal itu dikarenakan tidak jelasnya hukum formal yang mengatur. Sementara ini RUU KUHP yang sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah memuat ketentuan tindak pidana terhadap proses peradilan secara memadai, meliputi *criminal contempt of court* dan *civil contempt of court*. Oleh karena itu, tindak pidana terhadap proses peradilan tidak perlu diatur dalam UU khusus, namun cukup dimuat dalam RUU KUHP, yang perlu disinkronkan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta tidak melanggar hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas.

Tulisan kedua adalah kajian Rasbin tentang Desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi. Tulisan ini merupakan studi kasus di Indonesia. Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia sudah lebih dari satu dekade. Manfaat pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut harus bisa diketahui secara jelas. Studi-studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi secara umum masih belum mendapatkan kesimpulan yang konklusif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan metode estimasi panel *fixed effect*. Analisis didasarkan pada data time series tahunan yang mencakup periode waktu 2009 – 2013 terhadap 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif terhadap variabel stabilitas makroekonomi menunjukkan bahwa pada tahun 2013, indeks MI paling besar adalah Provinsi Banten sedangkan indeks MI paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan indeks tersebut, Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki ketidakstabilan makroekonomi yang paling tinggi sedangkan tingkat kestabilan makroekonomi yang tinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Studi ini juga menemukan bukti bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi tapi tidak signifikan. Artinya hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi tidak menunjukkan hubungan yang kuat.

Berikutnya tulisan dari Ari Muliarta Ginting yang membahas tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Tulisan ini juga merupakan studi kasus di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan 2014. Perkembangan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari berbagai indikator makroekonomi. Diantara indikator makroekonomi tersebut adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menjadi perhatian bagi pemerintah. Karena tingkat inflasi yang tinggi dapat mengganggu perekonomian dan menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga penelitian ini mencoba melakukan analisis perkembangan inflasi di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dan melakukan analisis pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data periode tahun 2004-2014. Perkembangan inflasi di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan tren yang rendah dan stabil, dengan rata-rata inflasi pada periode tersebut adalah 7,23% per tahun. Hasil analisis regresi VECM pada persamaan jangka panjang dihasilkan bahwa variabel output gap, nilai tukar, jumlah uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laju inflasi. Hasil yang sama juga untuk persamaan jangka pendek. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan variabel output gap, nilai tukar, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga BI dapat meningkatkan tingkat inflasi di Indonesia. Untuk itu maka dibutuhkan peran lebih pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengelola variabel makroekonomi, seperti nilai tukar, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dengan baik. Karena dengan variabel tersebut terkendali maka inflasi di Indonesia dapat terjaga. Serta mengendalikan dan meningkatkan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tulisan keempat merupakan hasil pengkajian dari Lokot Zein Nasution tentang reposisi peran dan fungsi Bulog dalam tata niaga pangan. Indonesia pernah merasakan swasembada pangan di dekade 1980-an, tetapi menurun tajam setelah tahun 1990-an. Momentum penurunan ini terjadi pasca diserahkannya sektor pertanian pada mekanisme pasar dan dirubahnya BULOG yang berfungsi sebagai pengendali tata niaga menjadi Perum. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah: (i) untuk menelusuri perbedaan format kebijakan tata niaga sektor pertanian melalui BULOG pada masa sebelum dan sesudah menjadi Perum; dan (ii) memberikan arah bagaimana meningkatkan kinerja tata niaga sektor pertanian melalui peran dan fungsi BULOG. Dua tujuan ini digali melalui analisis deskriptif dari data sekunder dan dieksplorasi dengan studi literatur. Data sekunder didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Sementara studi literatur diperoleh dari pengumpulan buku dan jurnal terkait dengan sejarah perjalanan tata kelola BULOG, serta teori format kelembagaan tata niaga pertanian. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama penurunan kinerja sektor pertanian akibat kinerja tata niaga yang tidak optimal. Kinerja tata niaga yang buruk setelah BULOG menjadi Perum karena struktur pasar di level hulu yang bersifat monopsoni dan di level hilir bersifat oligopoli. Dengan demikian, harus dilakukan peningkatan kinerja tata niaga pertanian dengan dikembalikannya peran dan fungsi BULOG yang dapat dilakukan melalui BLU (Badan Layanan Umum). Transformasi ini harus berfungsi sebagai pengendali pasar hasil-hasil pertanian, yang setidaknya melalui tiga kemampuan utama, yaitu: (i) sebagai pengendalian atau pengamanan harga bawah (floor price); (ii) pengendalian ekspor impor hasil pertanian; dan (iii) pendistribusian hasil pertanian secara efektif dan efisien. Tiga kemampuan tersebut dapat menjadi grand-design strategi peningkatan kinerja sektor pertanian yang ditandai dengan kesejahteraan petani sekaligus yang menguntungkan konsumen.

Tulisan kelima merupakan hasil penelitian dari Tri Rini Puji Lestari tentang analisis ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2014. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Untuk itu, puskesmas mempunyai andil yang besar untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Namun demikian, sampai saat ini, kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas sebagai salah satu faktor yang berpengaruh pada kualitas pelayanan puskesmas. Di sisi lain, kebijakan JKN mengakibatkan jumlah kunjungan pasien ke puskesmas semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan informan terpilih. Penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai ketersediaan tenaga kesehatan puskesmas guna memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya jumlah tenaga kesehatan di puskesmas, menjadikan beban kerja tenaga kesehatan puskesmas semakin tinggi dan tidak sesuai dengan tupoksi serta latar belakang pendidikannya. Sehingga pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan puskesmas. Untuk itu perlu dilakukan manajemen SDM yang nyata dan komprehensif.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada Jurnal "Kajian" edisi bulan Maret 2016. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang budiman. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan Jurnal "Kajian" di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, Prof. Gati Gayatri, MA, Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D, Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS dan Dr. Y. B. Suhartoko, S.E., M.E., sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam *Jurnal Kajian* edisi kali ini.

Jakarta, Maret 2016

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Puteri Hikmawati (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

LAW ENFORCEMENT OF CONTEMPT OF COURT

Kajian Vol. 21, No. 1, Tahun 2016, pp. 1-16

The article is the result of normative and empirical research of this, discuss the regulation of contempt of court, law enforcement, and regulation of contempt of court in the criminal code bill. Based on research, the contempt of court has been regulated in the Criminal Code and Criminal Procedure Code. However, not many cases handled by law enforcement officials, because the formulation of the law does not explicitly mention the related contempt of court. That's because no formal law regulating explicitly. While the criminal code bill which is being discussed by the Parliament and the Government contains provisions offenses to the judicial process adequately, covering criminal contempt of court and civil contempt of court. Therefore, it is an offense to the judicial process should not be regulated under a special law, but simply contained in the Bill, which needs to be synchronized with the Press Law and the Law on Advocates, and does not violate the right of people to express their opinions freely.

Keywords: contempt, the court, contempt of court, law enforcement.

FISCAL DECENTRALIZATION AND MACROECONOMIC STABILITY: THE CASE IN INDONESIA

Kajian Vol. 21, No. 1, Tahun 2016, pp. 17-35

Implementation of fiscal decentralization in Indonesia has been more than a decade. The benefit of fiscal decentralization should be known clearly. Research on the impact of fiscal decentralization to macroeconomic stability are generally inconclusive. This study is aimed to analyze the impact of fiscal decentralization on macroeconomic stability in Indonesia. To reach the goals, this study used fixed effect panel method. The analysis is based on the time series annual data covering the period 2009 – 2013 toward 33 province in Indonesia. Based on the descriptive analysis of macroeconomic stability variables showed in 2013, most major MI index is Banten Province while the lowest is in West Sulawesi Province. Based on that index, province of Banten is a province that has a macroeconomic instability are the highest, while the high level of macroeconomic stability that occurs in West Sulawesi. In addition, the study also found evidence that fiscal decentralization positive impact on macroeconomic stability but not significant. Indications of this finding is that the relationship between fiscal decentralization and macroeconomic stability did not show a strong relationship.

Keywords: fiscal decentralization, revenue decentralization, expenditure decentralization, macroeconomic stability, misery index.

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INFLATION: STUDY CASE IN INDONESIA PERIOD 2004-2014

Kajian Vol. 21, No. 1, Tahun 2016, pp. 37-58

The development of economic of a country can be seen from various macroeconomics indicator. Among those macroeconomics indicators, inflation is one of those factors that has been concerned by the government. Inflation has been concerned because of the high inflation can disturb the economy and lower the purchasing power of people. This research want to analyze the development of inflation in Indonesia from 2004 until 2014 and analyze the influence of factors that cause inflation in Indonesia. This research uses qualitative and quantitative methods and using the data from the period 2004-2014. The research found that the inflation in Indonesia from 2004 until 2014 showed the trend of low and stable, with the average inflation in the period was 7,23% per year. The regression analysis VECM the long term equation found that the variable gap, exchange rate, money supply, and interest rate have a positive and significant effect on the rate of inflation. The same result also for short term equation. Based on these results suggest that there is an increasing of inflation if those variables increase too. From this result, then the Government must control the inflation by managing the macroeconomic variables, such as exchange rate, money supply, and the interest rate. Because if the Government managed those variables under control then the inflation rate in Indonesia can be mantained in low and stable. Government must also manage and improve the production of goods and services to full the needs of people.

Keywords: Inflation, output gap, exchange rate, money supply and interest rate.

REPOSITIONING OF THE ROLE AND FUNCTION OF BULOG IN FOOD TRADE SYSTEM

Kajian Vol. 21, No. 1, Tahun 2016, pp. 59-73

Indonesia ever experience of the food self-sufficiency in the 1980s, but declined sharply after the 1990s. This decline occurred after the handed of the agricultural sector on market mechanisms and be modified BULOG which serves as the controller of market becomes Perum. Therefore, the aims of this study were: (i) to explore differences in policy of format trade system of agricultural sector through BULOG in the period before and after becoming Perum; and (ii) give directions how to improve the performance of the agricultural trade system through the role and function of BULOG. These two aim were explored through descriptive analysis of secondary data and explored with the study of literature. Secondary data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Agriculture, and the Ministry of Commerce. While the literature obtainable from books collections and journals related of historis of Bulog governance, as well as format of institutional agricultural trade system. The analysis showed that the main problems of the decline in agricultural sector performance is because unoptimal performance of trade system. After Bulog turn into Perum, trade system performance became degenerate because market structure at upstream level is monopsony market while at the downstream level is oligopolistic market. Thus, it should be improving the performance of agricultural trade system with the return of the role and function of BULOG which can be done through BLU (Public Service Board). This transformation should serve as a controlling market agricultural products, at least through three main capabilities, namely: (i) as a control or safety of floor price; (li) the control of export and import of agricultural products; and (iii) the distribution of agricultural products effectively and efficiently. Three such capabilities can be grand-design strategy for improving the performance of the agricultural sector which is characterized by farmers' welfare as well that can benefit the consumer.

Keywords: The Decline in Agricultural Performance, Trade System, BULOG, Controller Market, Public Service Board.

ANALYSIS OF AVAILABILITY HEALTH PERSONNEL IN THE HEALTH CENTER OF MAMUJU IN WEST SULAWESI, YEAR 2014

Kajian Vol. 21, No. 1, Tahun 2016, pp. 75-88

PHC is spearheading the health service. To that end, health centers have major stakes to realize the optimal level of public health. However, until now, the quality of health services in health centers are still frequent complaints by the people. Limited availability of health workers as one of the factors that affect the quality of health center services. On the other hand, the policy JKN resulting number of patient visits to health centers is increasing. This study used a qualitative approach using selected informants. The study aimed to obtain in-depth information about the availability of health workers health centers to provide health services at the health center. The results showed that the shortage of health workers in health centers, making the workload of health workers higher health centers and not in accordance with the duties and educational background. Thus ultimately decrease the quality of health center services. It is necessary for human resource management and comprehensive real.

Keywords: geothermal, renewable energy, security energy, program listrik, power plants, gaps in governance.